

BAB I

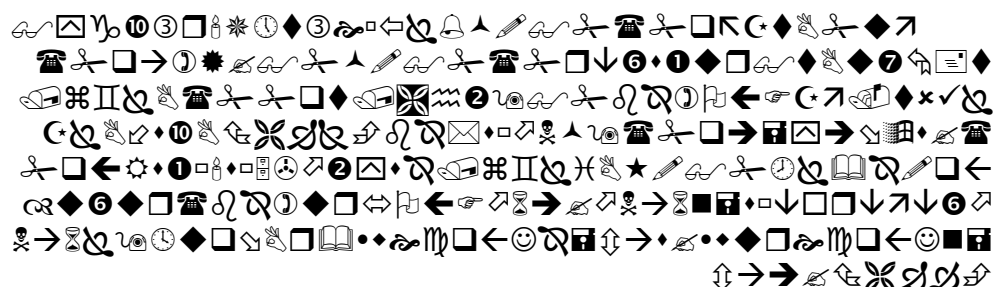
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran dimuka bumi mencari karunia Ilahi.¹

Bank disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *Financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.² Namun dibutuhkan suatu lembaga yang benar-benar menjalankan kegiatannya sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam menjalankan usahanya bebas dari praktik riba. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah.

Ayat Al-Qur'an yang melarang Riba tercantum dalam firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah 278-279 sebagai berikut:



¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), h. 7

² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.8-9

Artinya: “278.Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279.Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(Qs.Al-baqarah 278-279).³

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Sedangkan fungsi utama sebuah bank, termasuk bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah.

Salah satu produk perbankan syariah yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah pembiayaan Bai'al-murabahah. Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam bai'al-murabahah, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli kemudian menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵ Dalam murabahah, Bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

⁴Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.2

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 101

sebagaiapabila bank syariah membeli barang kepada *supplier* untuk dijual kepada nasabah.⁶

Semakin tingginyapermintaanpembiayaankonsumen untuk kendaraanbermotor oleh masyarakat dan untuk mengurangi risiko pembiayaanserta meningkatkanprinsipkehati-hatiandalampenyaluran pembiayaankonsumen,perlupengaturanmengenaiuang mukapembiayaan konsumenuntuk kendaraanbermotoroleh perusahaanpembiayaan.Oleh karenaitu,dikeluarkanPeraturanMenteriKeuangan No.43/PMK.010/2012. Perihalperusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaankonsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuanuangmukabagikendaraanrodaduapalingrendah20 persendari hargajualkendaraan.Uang mukabagikendaraanrodaempatuntuktujuan produktifminimal20persen.Sementara,uangmukabagikendaraanrodaempatuntuktuj uannon-produktifminimal25persen.⁷

Untuktetapdapatmenjagaperekonomianyangproduktifdan mampu menghadapitantangansektorkeuangandimasayang akan datang,perlu adanyakebijakanyang dapat memperkuatketahanansektorkeuanganuntuk meminimalisirsumbu-sumberkerawanan yang timbul,termasuk pertumbuhan PembiayaanKendaraanBermotor(PKB)yangberlebihan.Maka dikeluarkanSuratEdaranBankIndonesiaNo.14/33/DPbSPerihalpenerapanmanajem enrisikopadabankyang melakukanpemberiankredit pemilikanrumahdan

⁶Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005) h. 81

⁷Baca Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No.43/PMK.010/2012Tanggal15Maret2012

kredit kendaraan bermotor, pengaturan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terbagi dalam tiga ketentuan. Pertama, uang muka minimal 25 persen diperuntukkan bagi pembelian kendaraan bermotor roda dua. Kedua, uang muka minimal 30 persen bagi pembelian kendaraan bermotor roda empat untuk keperluan non-produktif. Ketiga, uang muka minimal 20 persen untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk keperluan produktif, atau bila memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan BI.⁸

Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang ketentuan penerapan uang muka di atas tentunya berdampak pada penurunan penjualan sepeda motor nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Table I.1

Penjualan Sepeda Motor 2012			
Merek	Desember	2012	Pangsa (%)
Honda	305.567	4.092.693	57,31
Yamaha	139.809	2.433.354	34,07
Suzuki	32.095	465.630	6,52
Kawasaki	10.404	13.1657	1,84
TVS	966	18.252	0,26
Total	488.841	7.141.586	100

Sumber: Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) tersebut, penjualan sepeda motor nasional tahun 2012 turun 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya 8,034 juta unit menjadi 7,141 juta unit. Pada bulan terakhir tahun lalu, penjualan mencapai cukup tajam, yaitu tersisa

⁸Baca Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/33/DPb STanggal 27 November 2012.

488.841 unit atau anjlok 22,04 persen dibandingkan bulan

sebelumnya (November) 627.048 unit.⁹

Oleh karena itu untuk meminimalisir dampak tersebut, pelaku industri sepeda motor memanfaatkan sumber pendanaan alternatif dari pembiayaan dengan prinsip syariah, karena pembiayaan syariah tidak terkena aturan tersebut, dalam Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000, besaran uang muka boleh diminta pembiayaan syariah apabila kedua belah pihak bersepakat.

Namun, setelah peneliti melakukan pra riset di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai, peneliti menemukan realita yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai. Dimana, terdapat juga penurunan nasabah pembiayaan kendaraan motor roda dua pada tiap tahunnya.

Tabel I.2
Jumlah nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang terhimpun di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.

No	Tahun	Jumlah Nasabah PKB	Frekwensi Penurunan Nasabah
1	Januari - Desember 2012	21	-
2	Januari - Desember 2013	17	4
3	Januari - Desember 2014	4	13

Sumber : Dokumen PT. BSM KCP Sukajadi Dumai.

Uang muka pembiayaan kendaraan bermotor roda dua dengan persentase sebesar 25% sampai 30% dari minimal 25% dari Surat Edaran Bank Indonesia.¹⁰

⁹<http://autoblogindonesia.wordpress.com/2013/01/08/data-aisi-tahun-2012-penjualanmotor-nasional-turun/>, diunduh Tanggal 09 Januari 2015, Pkl. 6:48.

¹⁰Observasi Awal Penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai, 23 September 2014

Memang persentase yang di gunakan tidak menyalahi aturan dari surat edaran. Namun, kenaikan persentase uang muka yang besar justru membebaskan nasabah, kemudian nasabah tidak mengetahui kejelasan informasi kenaikan uang muka yang di berikan oleh pihak bank, sehingga tidak adanya kesepakatan penetapan uang muka yang melibatkan nasabah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang salah satu produk pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu sukajadi Dumai dengan judul yaitu: **“KEBIJAKAN UANG MUKA (*DOWN PAYMENT*) PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUKAJADI DUMAI MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini secara mendalam, maka Penulis membatasi pembahasan ini hanya padakaryawan dan nasabah Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor di PT Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai?

2. Bagaimana Dampak Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Uang Muka Pada Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.
- b. Untuk Mengetahui Dampak Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.
- c. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Uang Muka Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bahan kajian dan rujukan sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang kebijakan uang muka pembiayaan murabahah kendaraan bermotor di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur untuk penelitian selanjutnya dalam pembahasan yang sama dimasa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai yang beralamat di Jl. Diponegoro No.182, Kel.Rimba Sekampung, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena penulis melihat uang muka pembelian kendaraan bermotor berbeda-beda di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai. Sedangkan yang menjadi Objeknya adalah Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukajadi Dumai.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 54 orang, terdiri dari 12 orang karyawan bank dan 42 orang nasabah bank syariah mandiri kantor cabang pembantu sukajadi dumai. Sedangkan sampel dari pihak bank diambil 1 orang yang dapat mewakili yaitu *retail banking officer*, Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah

teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹ Menurut pendapat gay, apabila jumlah sampel relative kecil maka sampel dari pihak nasabah diambil 20% dari populasi, sehingga ditemukan ukuran sampel berjumlah 8 orang.¹²

4. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari pimpinan, karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai, kemudian diolah langsung oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan angket.
- b. Data Sekunder adalah data diperoleh dari penunjang berupa penelaah buku bacaan *Library Research* serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.¹³

¹¹Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung:Alfabeta, cetakan ke-4, 2013), hlm. 126

¹²Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.181

¹³Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009),h. 51.

- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui proses dialog atau tanya jawab secara langsung dengan pimpinan dan karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai.
- c. Angket, yaitu data yang diperoleh dari pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden yang telah ditentukan.¹⁴

6. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian di klasifikasikan serta di analisa. Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini maka penelitian ini, dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2001), Edisi Sembilan Belas, h.162.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SUKAJADI DUMAI

Pada bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisi tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi misi perusahaan, produk dana dan jasa bank syariah mandiri.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori yang mendasar dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori yang digunakan berasal dari literatur yang ada, terdiri dari Bank Syariah, Pengertian Uang Muka, Pengertian Pembiayaan, Murabahah, Landasan Hukum Murabahah dan Ilustrasi Pembiayaan Murabahah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di bahas mengenai hasil observasi pada Objek yang di pilih sebagai tempat mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai Kebijakan Uang

Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai, Dampak Kebijakan Uang Muka (*Down Payment*) Terhadap Minat Nasabah Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sukajadi Dumai dan Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.